

**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA DI PROVINSI BANTEN
UNTUK PENINGKATAN NILAI INDEKS DESA MEMBANGUN**



Bidang Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2021

ANALISIS PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

DI PROVINSI BANTEN BERDASARKAN NILAI IDM UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini mem- bangunan desa di Provinsi Banten berdasarkan capaian nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dimana dalam capaiannya mengalami peningkatan tetapi berjalan lambat dibandingkan desa lainnya di Indonesia sehingga masih memerlukan akselerasi agar berdampak pada peningkatan capaian indikator makro secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian secara umum terlihat bahwa Pemerintah Desa belum secara optimal memanfaatkan keberadaan Pendamping Lokal Desa dimana pendamping lokal desa memiliki tugas untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan yang berskala lokal Desa. Kemudian Kurangnya kepedulian Pemerintah Desa dalam Hal pengisian data IDM ataupun menindaklanjuti hasil capaian IDM. Hal ini juga ditemukan dilapangan dengan banyaknya proses input IDM yang dilakukan hanya oleh Pendamping Lokal Desa dan Pemerintah Desa tidak mengetahui hasil capaian IDM yang diperoleh (hanya tanda tangan Berita Acara saja).

Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah perlunya peningkatan pemahaman tentang IDM dan infiltrasi kesadaran pentingnya data IDM dalam penyusunan Perencanaan. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah kebijakan berupa penerbitan *Surat edaran dari Kepala Daerah/Kepala Dinas tentang proses input IDM serta kewajiban Pemerintah Desa untuk mengumumkan hasil IDM dalam papan informasi di Desa (Nilai dan status desa)*. Permasalahan lainnya adalah persepsi yang sempit tentang makna pembangunan dimana pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas fisik lainnya serta persepsi yang salah dari Pemerintah Desa bahwa Desa tertinggal akan mendapatkan dana desa yang besar. Diperlukan peningkatan peran Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Dinas yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik di level Kabupaten atau pun Provinsi untuk memberikan pemahaman bagi Kepala Desa beserta jajarannya tentang makna pembangunan yang sesungguhnya.

Selanjutnya kurangnya sinergitas antara Dinas Pemdes Kabupaten dengan Pendamping Lokal Desa dimana koordinasi dan pembahasan sinergitas hanya sampai level TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten (Koordinator Kabupaten, Tenaga Ahli Terampil Mahir) sehingga dipandang perlu dibuatkan agenda rutin untuk melakukan pembahasan progres dan permasalahan pembangunan desa. Hal ini perlu dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melalui Dinas yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan memberikan pendampingan anggaran dalam mekanisme penyusunan IDM yang nantinya dibuatkan suatu desain *Reward and Punishment* untuk Pemerintahan Desa dan PLD meninjaklanjuti hasil IDM.